

PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

Andi Gunawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: andigunawan094@gmail.com

ABSTRACT

Received :
02-01-2024

Received in Revised
Format : 03-01-2024

Accepted :
05-01-2024

Available Online :
06-01-2024

This research was conducted to know the significant level of Effect of Public Participation on Transparency of Rural and Village Expenditure Budget Management (APBDesa) partially showed that Community Participation has a positive and significant impact on Transparency of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDesa) with the result of the $6,205 > 1,983$ tables and Has a sig value (probability) of 0.000 which is smaller than 0.05, it indicates that community participation is stronger in influencing the variables of Transparency Management of Revenue and Expenditure Budget of Village (APBDesa). From the results of the research, it was found that the influence of public participation on the transparency of the management of the village income and expenditure budget

(APBDesa) in Telagamurni village in the Cibitung sub-district showed that community participation had a positive effect on the transparency of village revenue and expenditure budget management (APBDesa).

Keywords: *Community Participation, Transparency of Revenue, Expenditure Budget Management (APBDesa)*

PENDAHULUAN

Desa, sebagai entitas masyarakat hukum, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan lokal berdasarkan warisan budaya dan asal-usulnya yang diakui dalam kerangka Pemerintahan Nasional di bawah yurisdiksi Kabupaten. Fungsi desa sebagai pendorong utama dalam menjalankan berbagai aspek pembangunan, termasuk pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan sosial masyarakat, termasuk tugas-tugas yang terkait dengan pembangunan yang bersifat terpadu dan saling terkait, yang

mencakup kehidupan dan keberlangsungan masyarakat.

Pembangunan desa berkaitan erat dengan praktik pengaturan pemerintahan yang efektif di suatu negara, sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip yang efisien dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Proses pembangunan bertujuan untuk merealisasikan tujuan Negara menciptakan

masyarakat yang sejahtera di seluruh wilayah Indonesia. Namun, meskipun pembangunan adalah landasan untuk mencapai kesejahteraan universal, belum semua penduduk Indonesia menikmati hasilnya secara merata. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi penting dalam pembangunan, khususnya di tingkat desa, adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada.

Dalam proses pembangunan partisipasi Peran masyarakat dalam proses pembangunan dapat dibagi menjadi beberapa tahap, dimulai dari penerimaan informasi, respons terhadap informasi tersebut, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penerimaan kembali hasil pembangunan. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas mandiri masyarakat. Sebagai hasil dari partisipasi ini, masyarakat dilibatkan dalam berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi perkembangan. Dalam konteks pembangunan desa, peran partisipasi masyarakat sangat penting karena tujuan pembangunan desa adalah kemajuan desa itu sendiri dan optimalisasi sumber daya yang ada. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai daftar keinginan belaka, melainkan sebagai kontribusi nyata dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat, dengan menggunakan kriteria yang terukur (Ray Septianis Kartika 2012).

Dalam fungsi pemerintahan, pemerintah desa di selenggarakan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan APBDesa mengharuskan pemerintah desa untuk secara terbuka memberikan informasi kepada masyarakat. Perencanaan APBDesa harus mencakup aspek hukum, program, jadwal pelaksanaan, pelaku kegiatan, alokasi anggaran, dan target yang ingin dicapai melalui program/kegiatan tersebut (Putu Eka Purnamaningsih, 2013).

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengevaluasi serta menjelaskan sejauh mana partisipasi masyarakat berdampak terhadap tingkat transparansi dalam pengelolaan APBDesa di Desa Telagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif, dimana Populasi dalam penelitian ini adalah Semua masyarakat Desa Telagamurni kecamatan cibitung kabupaten sukabumi berjumlah 5806 orang, dan menggunakan *Nonprobability Sampling* dan dengan rumus Slovin, maka Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 orang dari masyarakat dan aparatur desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung

Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas (*independent*), dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) sebagai variabel terikat (*dependent*).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Primer berupa wawancara dan quisioner dan Sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan, arsip, serta peraturan perundang-undangan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode statistik nonparametrik yang tidak mengharuskan terpenuhinya banyak asumsi, seperti asumsi distribusi normal pada data yang dianalisis (Sugiyono,2014:150).

Peneliti menggunakan statistik nonparametris karena sesuai dengan analisis yang digunakan yaitu analisis data ordinal.

Alat Analisis

Uji Regresi Linear Sederhana

Regresi dengan satu variabel independen disebut regresi linier sederhana, sementara regresi dengan dua atau lebih variabel independen disebut regresi linier berganda. Pengujian hipotesis ini dilakukan

menggunakan alat analisis regresi sederhana. Software SPSS digunakan untuk menguji hipotesis karena dapat menghasilkan output yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Oleh karena itu, diformulasikanlah model regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 100 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,99799429 |
| | Absolute | ,048 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,042 |
| | Negative | -,048 |
| Test Statistic | | ,048 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 24 for windows

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel sebesar 0,200 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel memiliki distribusi data normal.

Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Dari hasil yang ada, persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 15,609 + 0,353X_1 + \epsilon$$

Model persamaan regresi dalam bentuk persamaan regresi yang telah disesuaikan adalah seperti berikut:

Nilai konstanta untuk Transparansi Pengelolaan APBDesa sebesar 15,609 menandakan bahwa nilai variabel Transparansi Pengelolaan APBDesa akan berada pada 15,609.

Koefisien regresi X_1 sebesar 0,353 mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap

Transparansi Pengelolaan APBDesa. Artinya, jika partisipasi masyarakat meningkat sebesar 100%, maka Transparansi Pengelolaan APBDesa akan meningkat sekitar 35,3%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

Berdasarkan hasil persamaan regresi, terlihat bahwa Partisipasi Masyarakat (variabel independen) memiliki pengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan APBDesa (variabel dependen) dengan koefisien beta sebesar 0,353.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 15,609 | 2,966 | | 5,262 | ,000 |
| | Partisipasi Masyarakat | ,353 | ,057 | ,531 | 6,205 | ,000 |

Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji t pada tabel, variabel partisipasi masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan APBDesa menunjukkan nilai thitung sebesar 6,205, sedangkan nilai ttabelnya adalah 1,983. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel ($6,205 > 1,983$). Selain itu, nilai signifikansi (sig) adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kita dapat menolak H_0 dan menerima H_a . Kesimpulannya, terdapat pengaruh signifikan dari partisipasi masyarakat terhadap Transparansi

Pengelolaan APBDesa di Desa Telagamurni.

Tabel 3. Hasil Uji T

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 15,609 | 2,966 | | 5,262 | ,000 |
| Partisipasi Masyarakat | ,353 | ,057 | ,531 | 6,205 | ,000 |

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji determinasi, di dapat nilai *R Square* sebesar 0,282 atau sebesar 28,2%. Artinya bahwa variabel independen Partisipasi masyarakat mempengaruhi variabel independen yaitu Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) sebesar 28,2% dan selebihnya 71.8 % (100% - 28,2%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa penelitian ini. Karena *R Square* berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin besar *R square* maka semakin kuat variabelnya. Seperti diketahui diatas nilai *R Square* 28,2% Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Telagamurni dipengaruhi oleh variabel partisipasi masyarakat. Sedangkan 71,8% dipengaruhi oleh variabel lain seperti Gaya kepemimpinan Kepala Desa dan variabel-variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan melalui penyebaran angket kepada Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Telagamurni Kecamatan Cibitung Kabupaten Sukabumi menyimpulkan bahwa pemerintah Desa Telagamurni telah mengelola anggaran pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan UU No. 113 tahun 2014. Temuan ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan APBDesa, sebagaimana dibuktikan dengan nilai *T*hitung yang lebih besar dari *T*tabel pada tingkat signifikansi 5%, yaitu 6,205 > 1,983, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah bagi pihak Desa sebagai lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak pembangunan daerah lebih meningkatkan proporsi kinerja dan realisasi anggaran lebih tepat kepada pembangunan daerah. Bagi Masyarakat Desa Telagamurni, harus lebih meningkatkan kembali partisipasi kepada desa agar guna tercapai desa yang sejahtera dan transparans terbebas dari korupsi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. (2015). *Akuntansi pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha ilmu.

Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Progam IBM SPSS 23*. Edisi 7. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.

Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlanga.

Putu, Eka, Purnamaningsih. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. E-jurnal, Universitas Udayana.

Ray. Septianis, Kartika. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa*. E-journal.

Rochmansjah, Heru. Chabib. Soleh. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Graha ilmu

Suci, Indah, Hanifah. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)* E-jurnal, Vol. 4 No. 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru.